



Bambang Tri Cahyono

Kebijakan Uang Ketat dan Implikasinya Bagi Dunia Bisnis di Indonesia

Pendahuluan

Kebijakan uang ketat yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia ternyata berkepanjangan dengan dikeluarkannya Gebrakan Sumarlin II berupa penarikan aset 12 BUMN sebesar Rp. 8 triliun untuk digantikan dengan Sertifikat Bank Indonesia. Kebijakan ini mengundang banyak komentar pro dan kontra karena mempunyai implikasi bisnis yang nyata, minimal bagi para investor yang tergantung pada pinjaman bank, mengingat bahwa kebijakan ini telah mampu meningkatkan suku bunga bank-bank umum dari 20 persen menjadi sekitar 30 persen. Makalah ini menganalisis dampak kebijaksanaan tersebut dan relevansinya bagi dunia bisnis di Indonesia.

Tinjauan Teoretis

Secara teoretis, maka kebijakan uang ketat dimasukkan untuk mengurangi jumlah uang beredar sedemikian rupa, sehingga pada tingkat permintaan uang tertentu terjadi peningkatan tingkat bunga pada

bank-bank umum. Permintaan uang sebagaimana diketahui, terjadi untuk dua hal, yaitu untuk keperluan transaksi (dan berjaga-jaga) serta untuk keperluan spekulasi. Pada sektor rumah tangga, biasanya permintaan yang terjadi karena motif transaksi, sedangkan di sektor bisnis, permintaan uang kebanyakan untuk keperluan spekulasi. Perbedaan antara motif spekulasi dan motif transaksi terletak pada responnya terhadap indikator ekonomi tertentu, yaitu tingkat bunga dan pendapatan. Masyarakat mengadakan tambahan transaksi apabila pendapatannya bertambah, demikian sebaliknya, akan mengadakan pengurangan transaksi apabila pendapatannya menurun. Dalam dunia bisnis, pengusaha mengadakan spekulasi dalam bentuk tambahan investasi apabila tingkat bunga menurun dan akan sebaliknya, mengurangi investasi apabila tingkat bunga menaik. Kita mengetahui bahwa kebijaksanaan uang ketat yang dilakukan pemerintah telah menyebabkan tingkat bunga di bank-bank umum

meningkat secara drastis dan hal ini menyebabkan gairah investasi swasta menurun dengan drastis pula. Apakah ini merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah?

Apabila tujuan pemerintah mengadakan kebijakan uang ketat adalah untuk mengurangi tingkat inflasi sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sumarlin, maka hal ini kurang mempunyai dasar teoretis. Dari tinjauan teoretis di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan uang ketat telah menyebabkan gairah investasi berkurang, sehingga persediaan barang dalam jangka menengah akan berkurang di masyarakat. Pengurangan jumlah persediaan barang yang dipasarkan sebagai akibat dari berkurangnya investasi adalah meningkatnya harga barang tersebut atau dengan lain perkataan akan terjadi inflasi, apabila peningkatan harga barang terjadi secara umum. Memang benar bahwa inflasi dapat diturunkan dengan kebijakan uang ketat, namun penurunan inflasi ini sebagai akibat dari berkurangnya daya beli masyarakat, khususnya masyarakat bisnis atau pengusaha Indonesia.

Implikasi Bagi Pengusaha

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan langsung daripada diadakan kebijakan uang ketat adalah untuk mengurangi daya beli pengusaha atau secara tetap mengurangi motif spekulasi di kalangan pengusaha. Alasan berkembangnya spekulasi dapat disebut sebagai sebab terjadinya kebijakan uang ketat yang tidak secara eksplisit dinyatakan oleh pemerintah. Sedangkan dampak dari

kebijakan uang ketat adalah berkurangnya motif spekulasi di mana hal ini juga tidak disebut secara eksplisit oleh pemerintah. Pemerintah hanya menjelaskan bahwa kebijakan uang ketat baru-baru ini adalah sebagai tindakan pencegahan mengalirnya uang rupiah ke dolar atau mata uang asing lainnya. Bila ditelusuri lebih lanjut, maka bukan hanya valuta asing yang menjadi bahan spekulasi pengusaha, namun yang lebih tampak ke permukaan selama dua tahun terakhir ini adalah spekulasi dalam bisnis tanah. Spekulasi tanah ini juga tidak disebut sebagai sebab dilaksanakannya kebijakan uang ketat.

Pemerintah memang sangat berhati-hati dalam menjelaskan kebijakan moneter, karena apabila dijelaskan secara eksplisit, akan diantisipasi oleh masyarakat bisnis secara rasional berdasarkan kepentingan bisnis masing-masing. Pada dasarnya dunia bisnis di Indonesia sebagian besar dimonopoli oleh segelintir konglomerat saja. Rasio konsentrasi 4 perusahaan besar yang memiliki pangsa penjualan di atas 70 persen adalah sekitar 45 persen pada tahun 1990. Hal ini berarti bahwa sekitar separoh dari kegiatan bisnis masing-masing industri besar di Indonesia dimonopoli oleh empat perusahaan terbesar dibidangnya. Atau terjadi kekuatan oligopolistik dalam struktur bisnis di Indonesia, sehingga harga yang terjadi merupakan harga monopoli.

Implikasi dari kekuatan monopoli ini adalah bahwa penetapan harga di pasar lebih banyak diatur oleh pengusaha atau pemonopoli daripada oleh

pemerintah. Di sini pemerintah kurang mampu mengatur harga di sektor riil, sebagai gantinya, pemerintah hanya mampu mengatur harga lewat sektor moneter. Namun pengaturan di sektor moneter tidak dapat dilakukan semena-mena, karena mekanismenya tidak langsung mengubah harga melainkan melalui perubahan tingkat bunga dan baru akhirnya merubah harga atau tingkat inflasi.

Kebijakan uang ketat sebagai piranti dari kebijaksanaan moneter, memiliki kemampuan penting, yaitu mampu mencegah uang dari gangguan-gangguan ekonomi, mampu memberikan latar belakang stabilitas perekonomian, dan mampu mengimbangi gangguan ekonomi yang muncul dari sumber selain moneter (Friedman, 1968). Tampaknya ketiga kemampuan kebijakan uang ketat ini oleh pemerintah dijadikan sebagai senjata untuk stabilitas perekonomian, namun kebijakan yang digunakan terlalu tajam sehingga dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi stabilitas ekonomi yang ingin dicapai itu sendiri.

Pemerintah sebelum melakukan kebijakan uang ketat sudah mengetahui dengan jelas sasaran yang ingin dicapai dan variabel-variabel yang dapat dikontrol dari kebijakan uang ketat tersebut. Di sini tampaknya pemerintah ingin mengontrol variabel kurs valuta asing, tingkat inflasi, dan jumlah uang beredar di masyarakat. Kontrol ini akan mujarab bila ketergantungan dunia bisnis terhadap dunia perbankan sangat tinggi. Hanya bisnis yang tergantung pada kredit bank,

baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui mitra bisnisnya), yang akan terkena musibah dari kebijakan uang ketat. Namun secara keseluruhan, apabila yang terkena musibah mempunyai kedudukan monopoli, maka kebijakan uang ketat minimal akan merubah target-target spekulatif para pengusaha tersebut.

Bila selama ini para pengusaha yang memiliki kedudukan monopoli memilih diversifikasi produk pada sektor-sektor non riil seperti tanah dan valuta asing, maka tubrukan secara besar-besaran di sektor-sektor tersebut menyebabkan peningkatan nilai tanah dan valuta asing di Indonesia. Bila jumlah tanah terbatas, khususnya di daerah-daerah bisnis di dalam perkotaan, maka peningkatan harga tanah di daerah tersebut sudah sangat tidak realistis, sehingga mendorong terjadinya *cost push inflation*, yaitu kenaikan harga tanpa disertai dengan kenaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu para pengusaha monopoli juga melakukan tindakan-tindakan kurang rasional dalam membeli valuta asing, sebagai usaha untuk melakukan pembelanjaan dari hasil *monopoly rent* yang diperoleh dari bisnisnya. Tindakan pembelian valuta asing tersebut lebih banyak merupakan tindakan spekulatif karena anggapan akan terjadi devaluasi dolar di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menjamin tidak akan melakukan devaluasi, namun semakin dijamin tidak akan ada devaluasi, masyarakat pengusaha semakin percaya bahwa akan terjadi devaluasi. Ini ibarat

seperti tingkah laku gatotkaca, di mana tangannya memberi tanda ke kiri pada saat akan membelok ke kanan dan sebaliknya. Pengusaha akan berperilaku seperti tidak mau terkecoh untuk ketiga kalinya oleh pernyataan pemerintah tentang devaluasi pada masa yang lalu.

Antisipasi pengusaha dengan adanya kebijaksanaan uang ketat adalah sangat beragam, tergantung dari jenis industri yang dikelolanya. Bisnis real estate, seperti perumahan, akan mengalami kegoncangan dari adanya kebijakan ini. Seperti diketahui, bisnis perumahan sangat tergantung pada kredit bank. Apabila tingkat bunga naik secara tajam, maka prospek bisnis perumahan akan terancam. Tidak banyak masyarakat yang mau membeli rumah dengan tingkat bunga tinggi, apalagi dalam jumlah besar dan dalam waktu panjang. Bila kebijakan ini diharapkan berlangsung dalam jangka pendek, maka masyarakat lebih baik menunggu sampai tingkat bunga menurun pada posisi semula. Namun penurunan ini belum pasti kapan akan terjadi, sehingga dunia bisnis perumahan akan diliputi oleh ketidakpastian.

Catatan Penutup

Kebijakan uang ketat yang berkepanjangan, terutama setelah dilakukannya Gebrakan Sumarlin II telah menyebabkan dunia bisnis melakukan penyesuaian-penyesuaian jangka pendek. Bila sebelum kebijakan uang ketat diberlakukan, terjadi banyak spekulasi dalam permintaan dan pembelanjaan uang di

kalangan pengusaha, maka dengan adanya kebijakan uang ketat, para pengusaha melakukan kebijakan perusahaan yang lebih mengarah pada motif transaksi daripada motif spekulasi.

Pada saat motif spekulasi merajalela, pemerintah kurang melakukan antisipasi moneter, sehingga terjadi peningkatan inflasi yang hampir mencapai angka dua digit pada tahun 1990. Namun dengan kesigapan pemerintah lewat kebijakan uang ketatnya, maka laju inflasi dapat dikurangi dan bahkan sebab-sebab terjadinya inflasi, yaitu spekulasi dalam bidang tanah dan valuta asing dapat dicegah. Hal ini membuat para pengusaha terpaksa menjadwalkan kembali proyek-proyeknya. Namun pengusaha dengan kekuatan monopoli tidak akan terpengaruh banyak akibat adanya kebijakan uang ketat ini.

Sebaliknya pengusaha menengah ke bawah yang tidak memiliki kekuatan monopoli, akan terpaksa mencari sumber-sumber pinjaman selain bank yang memiliki biaya alternatif modal lebih rendah daripada tingkat bunga bank-bank umum. Namun tampaknya hal ini sulit dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah tersebut. Bagaimana pun setiap kebijakan senantiasa membawa manfaat bagi sementara orang dan nirmanfaat bagi sebagian yang lain. Bila kebijakan ini benar-benar dapat mengurangi motif spekulasi di kalangan dunia bisnis di Indonesia, maka kesejahteraan masyarakat di sektor riil akan tercapai dalam jangka waktu yang tidak lama lagi.

- Bahan Bacaan :**
- Ekonomi Moneter*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Majalah *Warta Ekonomi*, 1991, beberapa penerbitan.
- Blair, John N., 1978, *Economic Concentration, Structure, Behaviour, and Public Policy*, Harcourt, New York.
- Glan A. Iswara dan Nopirin, 1985,
-